

JURNAL

ISSN: 2338-9613



Administrasi Publik

FISIP UNSRAT

NOMOR : 003

VOLUME : III

SEPTEMBER 2014

J

Analisa Kinerja Badan Pengelola Kebersihan Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Manado
Oleh rully mambo

Peranan Sosial Budaya Masyarakat Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa Di Wilayah Kecamatan Tuminting Kota Manado Oleh Selvie M. Tumengkol

Hubungan Antara Gaya Manajemen Dan Efektivitas Organisasi Di Kantor Administrator Pelabuhan Bitung
Oleh Sofia A. P. Sambul

Hubungan Antara Pengawasan Manajerial Dan Efisiensi Kerja Dalam Birokrasi (Suatu Studi Di Sekretariat Daerah Kota Bitung)
Oleh Max Pangkey

Peranan Komunikasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
Oleh Anton Boham

Peran Kepemimpinan Dan Disiplin Pegawai Terhadap Kinerja Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Oleh Novva Plangiten

Pembinaan Moral Kerja Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kator Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
Oleh Marlien T. Lopian

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa
Oleh Juliana Tumiwa

Peranan Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dikecamatan Dimembe
Oleh Antje C. Sumilat

Perencanaan Partisipatif Sebagai Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Pada Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang)
Oleh Jouke J. Lasut

A

P



Penerbit dan Alamat Redaksi :
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNSRAT
Jalan Kampus Unsrat Bahu - Manado 95115
Telp. 0431-862586, Fax. 0431-862586. Laman <http://unsrat.ac.id>
Contact Person : 081221007654/ 081325600308

Pengelola Jurnal Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Sam Ratulangi

- PEMBINA** : Dekan FISIP UNSRAT
- PENANGGUNGJAWAB** : Dra. Mieke Roring, MA
Dra. F. Daicy Lengkong, M.Si
- DEWAN PAKAR** : Prof. Dr. Drs. Patar Rumapea, M.Si
- PIMPINAN REDAKSI** : Drs. J. Ruru, M.Si
- SEKRETARIS REDAKSI** : Drs. Burhanuddin Kiyai, M.Si
- DEWAN REDAKSI** : Dr. Dra. J. Rares, M.Si
Dr. Dra. Femmy D. G. Tulusan, M.Si
Jericho D. Pombengi, S.Sos, M.Si
- MANAJER UMUM** : Rully Mambo, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Analisa Kinerja Badan Pengelola Kebersihan Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Manado Oleh rully mambo	1
Peranan Sosial Budaya Masyarakat Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa Di Wilayah Kecamatan Tuminting Kota Manado Oleh Selvie M. Tumengkol	10
Hubungan Antara Gaya Manajemen Dan Efektivitas Organisasi Di Kantor Administrator Pelabuhan Bitung Oleh Sofia A. P. Sambul.....	18
Hubungan Antara Pengawasan Manajerial Dan Efisiensi Kerja Dalam Birokrasi (Suatu Studi Di Sekretariat Daerah Kota Bitung) Oleh Max Pangkey	26
Peranan Komunikasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Oleh Anton Boham	34
Peran Kepemimpinan Dan Disiplin Pegawai Terhadap Kinerja Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Oleh Novva Plangiten	44
Pembinaan Moral Kerja Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kator Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Oleh Marlien T. Lopian.....	57
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Oleh Juliana Tumiwa	67
Peranan Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Kecamatan Dimembe Oleh Antje C. Sumilat	74
Perencanaan Partisipatif Sebagai Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Pada Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang) Oleh Jouke J. Lasut	84

**PERENCANAAN PARTISIPATIF SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG DAN
PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
(Studi Pada Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang)**

Oleh

Jouke J. Lasut

Abstract: Poverty experienced by Indonesia is a proof and a valuable lesson of how the pattern of policies that result in a top-down is not good for us. How everything that is not open space creativity will lead to high dependency and creates weakness in all fields. The purpose of the study to determine whether participatory planning in the implementation of PNPB Mandiri in the Village of Stone Town has been running well. This type of research in this study is descriptive qualitative research. Process of data analysis including data reduction, Data Presentation, and Withdrawal conclusions. The results showed a factor supporting Participatory Planning and Implementation of PNPB Mandiri inhibitors such success. Due to the growing number of community members involved in the planning of the activities will better the development plan will be drawn up as development plans will be prepared in accordance with the needs of the community really needed.

Keywords: Participatory Planning, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini. Ketidakberdayaan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia semakin menambah kompleksitas permasalahan kemiskinan. Menurut sumber BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2014 mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen) atau meningkat 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada 2013 tercatat 28,06 juta orang (11,25 persen). Data yang diperoleh dari sensus nasional ini memang cukup memuaskan walau keakuratan data tersebut tetap dapat diperdebatkan. Terlebih data tersebut hanyalah data diatas kertas, faktanya kita masih bisa melihat masih banyak warga yang hidup dibawah garis kemiskinan

disekitar kita terlebih pada saat krisis global sekarang ini. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007 melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No.23/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007. Melalui

PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsure masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat dipedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai departemen/ sector dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang meliputi

pendekatan *top down* dan *Bottom up*, diatas kertas nampaknya akan menjamin adanya keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, kenyataannya banyak daerah belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi lokal, karena sebagian besar proposal yang diajukan berdasarkan aspirasi lokal telah tersingkir dalam rapat kordinasi yang menempatkan proposal yang diajukan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Akibatnya, proposal akhir yang masuk ke pusat biasanya di dominasi oleh proyek yang diajukan oleh level pemerintahan yang lebih tinggi khususnya pemerintah provinsi dan pusat (Kuncoro, 2004)

Selama ini semua kebijakan pembangunan baik social, politik dan terutama ekonomi adalah bersifat top down. Kemiskinan yang dialami oleh saudara-saudara kita adalah bukti dari lemahnya ekonomi rakyat. Kebijakan pembangunan yang selama bertahun-tahun berlangsung secara top-down menciptakan ketergatungan yang tinggi dari public terhadap pemerintahnya. Basis kekuatan ekonomi bukan berada aktivitas ekonomi rakyatnya, tetapi berada pada kekuasaan dan selera pemerintah yang amat dominan. Inilah sebuah kesalahan besar, yang harus dibayar dengan penderitaan rakyat pasca turunnya soeharto.

Kemiskinan yang dialami Indonesia merupakan sebuah bukti dan pelajaran berharga betapa pola kebijakan yang bersifat top-down berakibat sangat tidak baik bagi kita. Betapa segala sesuatu yang tidak membuka ruang kreativitas akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi serta menciptakan kelemahan disegala bidang. Sekali lagi jelas bahwa ketidakberdayaan ini akibat dari kebiasaan yang selama bertahun-tahun diatur dan dimanajemeni dari "atas". Kita tidak terbiasa untuk merencanakan hidup kita dengan target pencapaian yang jelas dan terukur.

Kelurahan Batu Kota sebagai salah satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Malalayang juga melaksanakan program Nasional tersebut. Kelurahan Batu Kota masuk dalam daftar 36 kelurahan lainnya sebagai kelurahan tertingga yang terdapat di wilayah Sulawesi Utara. Hal ini membuat segenap aparat pemerintah dan segenap masyarakat seperti mendapat warning untuk segera melakukan pembenahan terhadap kelurahan mereka. Terpilihnya Kelurahan Batu Kota sebagai salah satu tempat implementasi PNPM mandiri mengisyaratkan bahwa masih banyak warga Kelurahan Batu Kota yang hidup dibawah garis kemiskinan. Secara umum menurut pengakuan Lurah Kelurahan Batu Kota sendiri saat ini pelaksanaan PNPM di daerah tersebut telah berjalan cukup baik walaupun diakui ada beberapa kendala yang dihadapi apalagi pada saat pertama kebijakan tersebut mulai diimplemenasikan.

Khususnya pada saat proses perencanaan pembangunan, hal ini menjadi sulit dirasa karena selama ini stigma yang telah tertanam didalam masyarakat kita adalah bahwa persoalan kemiskinan itu adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/ aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Bratakusumah, 2004).

Jadi selama ini pemerintahlah yang dirasa paling bertanggung jawab dalam rangka mengatasi kemiskinan yang terjadi di republik ini. Sehingga menurut pengakuan beliau hal yang paling sulit adalah bagaimana merombak pola pikir masyarakat atas arti kemiskinan dan kemudian membangun nilai-nilai yang progresif dalam kehidupan mereka, bagaimana membangun sikap kebersamaan yang kuat di masyarakat, serta bagaimana mendorong kreativitas dan kemauan berpartisipasi dalam rangka mengatasi kemiskinan yang ada didaerah masing-masing.

Namun yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, bagaimana mengatasi kemiskinan dengan cara menciptakan masyarakat yang berdaya dan mandiri,

Bagaimana menciptakan masyarakat yang kreatif, masyarakat yang berkeahlian, masyarakat yang punya semangat untuk berubah. Kebijakan PNPM Mandiri boleh jadi suatu solusi akan hal itu.

Manfaat kehadiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sangat dirasakan oleh masyarakat. Karena berbagai program dan kegiatan yang dicanangkan oleh PNPM dapat diintegrasikan dengan program desa, maka segala masalah kemiskinan dapat sedikit teratasi. Hal ini berdampak kepada penurunan kualitas hidup warga yang mengarah pada bertambahnya angka kemiskinan. Kondisi ini diperparah dengan adanya krisis ekonomi global. Program PNPM sangat bermanfaat bagi masyarakat dan mampu bersinergi dengan program desa.

Dengan adanya program PNPM masalah kemiskinan dapat diatasi. "Mengingat masalah kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama," sehingga perlu tatanan administrasi yang baik dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kesekretariatan dalam sebuah organisasi memang sangat diperlukan, sehingga bagi pihak-pihak yang peduli dan percaya kepada BKM dapat lebih mudah berpartisipasi pada program kemitraan, agar membantu mempercepat penanggulangan kemiskinan. melibatkan masyarakat di dalam seluruh rangkaian kegiatan terutama dalam hal perencanaan. Karena perencanaan merupakan awal permulaan dari seluruh rangkaian kegiatan

karena tanpa adanya rencana yang baik maka seluruh rangkaian kegiatan yang mengikutinya akan menjadi tidak sistematis. perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. (Bratakusumah, 2004)

Menurut Abe (2002) Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

Menurut pendapat diatas, Perencanaan partisipatif membutuhkan masyarakat dilibatkan secara penuh didalamnya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan masyarakat di daerahnya untuk segera dipenuhi agar nantinya proses pembangunan tersebut tidak salah sasaran karena masyarakat ikut terlibat didalamnya. Sederhananya adalah pemerintah menyediakan dananya sementara masyarakatlah yang harus secara

kreatif, progresif, dan bertanggung jawab untuk mengelola dana yang dialokasikan oleh pemerintah. Tetapi prosesnya tidaklah sesederhana yang kita bayangkan.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan bisa jadi merupakan salah satu penghambat sekaligus pendukung dalam implementasi tersebut. kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, membuat pemerintah harus mencari cara bagaimana membangun kesadaran tersebut. karena seringkali masyarakat tidak menyadari bahwa mereka memiliki peran yang amat strategis dalam perencanaan pembangunan.

Hal yang sama juga terjadi di Kelurahan Batu Kota Kota Manado, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka perencanaan pembangunan di daerahnya masing-masing membuat implementasi PNPM Mandiri sulit untuk diimplementasikan pada awalnya. Karena tidak serta merta masyarakat mau menerimanya. Pemerintah harus berusaha keras untuk mengubah pola pikir masyarakat dari pola top-down menjadi bottom-up. Karena dalam kebijakan PNPM Mandiri masyarakatlah yang harus ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan namun prakteknya dilapangan partisipasi masyarakat tersebut masih kurang khususnya dalam perencanaan, karena ada sebagian dari masyarakat bersikap acuh tak acuh dan menganggap itu hanya urusan pemerintah kelurahan saja.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti (Sugiyono 1992)

B. Definisi Konseptual dan Operasional

Konsep/ variabel dalam penelitian ini dapat dirumuskan kedalam definisi operasional, sebagai berikut :

1. Perencanaan Partisipatif, didefinisikan sebagai pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah. Indikator dari variabel ini adalah : Keterlibatan masyarakat; Kejelasan, maksud, arah dan tujuan daripada rencana yang dibuat bersama masyarakat; Relevansi atau kesesuaian daripada rencana yang dibuat bersama masyarakat dengan masalah yang dihadapi atau kebutuhan masyarakat yang harus segera dipenuhi dalam proses perencanaan partisipatif
2. Implementasi dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara individu maupun kelompok pemerintah atau swasta yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan

sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan. Variabel implementasi dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator : Kecocokan atau kesesuaian antara aspek perencanaan kebijakan dengan isi kebijakan; Ketepatan tindakan implementasi kebijakan dengan permasalahan yang ada; Konsisten dengan rencana kebijakan yang ditetapkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini diperoleh melalui penelitian dokumentasi.

D. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan dan ditunjang dengan berbagai argumentasi tinjauan pustaka, diolah serta dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif dilengkapi dengan analisis data sekunder. Adapun proses analisis data meliputi :

1. Reduksi data, yaitu merangkum hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya
2. Penyajian data, menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk table, garfik dan sejenisnya

3. Penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Wawancara

1. Perencanaan Partisipatif dalam implementasi PNPM Mandiri

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Kelurahan Bahu sebanyak 50 responden melalui wawancara diperoleh hasil bahwa perencanaan partisipatif yang dilakukan dalam implementasi PNPM Mandiri di Kelurahan BatuKota Kota Manado sudah berjalan dengan cukup baik walaupun tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi.

Dari 50 responden yang dimintai tanggapan tentang perencanaan partisipatif didalam implementasi PNPM Mandiri ternyata 20% responden mengatakan proses perencanaan partisipatif yang dilakukan sudah cukup baik , sedangkan 70% responden mengatakan proses perencanaan partisipatif yang dilakukan sudah baik, sedangkan 10% sisanya mengatakan perencanaan partisipatif yang dilakukan masih buruk.

Proses perencanaan partisipatif yang dilakukan adalah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)

kelurahan. Musrenbang kelurahan adalah bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan di kelurahan untuk merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan terutama yang menjadi kewenangannya. Hasil musrenbang kelurahan akan digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Kelurahan dan merumuskan prioritas permasalahan dan indikasi kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah kelurahan. Selain itu musrenbang kelurahan pun dapat menjadi sarana bagi pemerintah kelurahan dengan masyarakat untuk merumuskan kegiatan pembangunan swadaya masyarakat kelurahan maupun kegiatan yang diusulkan untuk diajukan dibiayai melalui pos bantuan APBD.

Di kelurahan Batukota musrenbang Kelurahan tahap pertama oleh masyarakat, aparat kelurahan dan fasilitator PNPB Mandiri untuk membentuk Tim BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang nantinya BKM ini sebagai motor penggerak penumbuhan kembali solidaritas serta kesatuan social masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. BKM tersebut diberi nama BKM SEMERBAK. Selanjutnya setelah BKM tersebut dibentuk, musrenbang tahap kedua dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan

pemerintahan kelurahan untuk merumuskan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan) dimana didalamnya terdiri dari pemetaan permasalahan yang dihadapi di kelurahan tersebut, daftar prioritas kegiatan urusan pembangunan untuk menyusun rencana kerja, daftar prioritas permasalahan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara swadaya, daftar prioritas permasalahan masyarakat yang harus ditanggulangi dan daftar nama-nama warga miskin yang menjadi sasaran Utama PNPB Mandiri. Dimana dalam setiap tahapan musrenbang masyarakat Kelurahan Batukota selalu terlibat didalamnya.

2. Implementasi PNPB Mandiri di Kelurahan Batukota

PNPB Mandiri adalah suatu program baru yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. PNPB Mandiri adalah suatu program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPB Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya

penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun secara berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Jadi PNPB Mandiri merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberdayakan masyarakat agar dapat mengubah masa depan dan kesejahteraannya meningkat secara mandiri.

B. Perencanaan Partisipatif Sebagai Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PNPB Mandiri di Kelurahan Batukota Kecamatan Malalayang

1. Perencanaan Partisipatif Sebagai Faktor Pendukung PNPB Mandiri di Kelurahan
Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat mengenai perencanaan partisipatif sebagai faktor pendukung dalam implementasi PNPB Mandiri diperoleh bahwa dari 50 responden yang dimintai keterangannya tentang perencanaan partisipatif sebagai faktor pendukung implementasi PNPB

Mandiri ternyata sebanyak 45 responden (90%) mengatakan bahwa perencanaan partisipatif merupakan faktor pendukung implementasi PNPB Mandiri tersebut karena menurut masyarakat semakin banyak masyarakat yang terlibat didalam proses perencanaan partisipatif makin bagus, dalam hal ini menurut masyarakat semakin banyak warga masyarakat yang terlibat dalam Implementasi PNPB Mandiri maka hal ini dapat menjadi faktor pendukung didalam Implementasi PNPB Mandiri. 5 responden (10%) mengatakan bahwa perencanaan partisipatif tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam implementasi PNPB Mandiri, hal ini menurut mereka walaupun masyarakat dilibatkan seringkali hasilnya tidaklah tepat pada sasaran yang telah ditentukan.

2. Perencanaan Partisipatif Sebagai Faktor Penghambat PNPB Mandiri

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan hasil penelitian. Dari 50 responden yang dimintai keterangan terhadap Perencanaan Partisipatif Sebagai Faktor Penghambat PNPB Mandiri maka sebanyak 43 responden (86%) mengatakan bahwa Perencanaan Partisipatif bisa menjadi penghambat dalam implementasi PNPB Mandiri jika jumlah masyarakat yang ikut dalam kegiatan perencanaan tersebut sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada, karena jika keterlibatan masyarakat semakin sedikit di dalam kegiatan perencanaan, maka bisa jadi rencana

yang dihasilkan tidak tepat sasaran yaitu kepada warga miskin yang ada di Kelurahan Batukota tetapi bisa jatuh kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya. Dalam hal ini masyarakat mengatakan semakin sedikit warga masyarakat yang dilibatkan dalam perencanaan partisipatif, maka hal ini bisa menjadi factor penghambat implementasi PNPM Mandiri tersebut. sedangkan sebanyak 7 responden (14%) mengatakan perencanaan partisipatif tidak menjadi penghambat dalam implementasi PNPM Mandiri karena menurut mereka hal tersebut tidak berpengaruh banyak dalam implementasi PNPM Mandiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan partisipatif yang dilaksanakan di Kelurahan Batu Kota Manado ternyata telah berjalan amat baik, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan Warga masyarakat di dalam kegiatan perencanaan yang dilaksanakan sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan apa saja yang sedang dihadapi masyarakat, karena masyarakatlah yang paling mengetahui apa yang mereka butuhkan dan menyampaikannya di dalam kegiatan MUSRENBANG serta permasalahan apa saja yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan dan segera dicari penyelesaiannya. Tingkat kesadaran warga masyarakat untuk ikut serta dalam menanggulangi kemiskinan juga sudah cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari anggota kepengurusan BKM yang semuanya diisi oleh Warga Batu Kota sendiri. Selain itu usaha pemerintah setempat untuk selalu mengajak warga masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan partisipatif juga cukup baik hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa program ini memang baik adanya.
2. Bahwa Perencanaan Partisipatif merupakan faktor pendukung dan Penghambat keberhasilan Implementasi PNPM Mandiri tersebut. Karena dengan semakin banyak warga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan perencanaan tersebut maka akan semakin baik pula rencana pembangunan yang akan disusun karena rencana pembangunan yang akan disusun tersebut akan sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan segera dicarikan pemecahan masalahnya yang paling tepat. Hal ini dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan Pelaksanaan atau Implementasi PNPM Mandiri tersebut. Sebaliknya jika partisipasi masyarakat kurang di dalam proses perencanaan tersebut, hal ini bisa menjadi faktor penghambat

keberhasilan implementasi PNPM Mandiri, karena nantinya rencana yang disusun hanya sesuai dengan kepentingan pihak-pihak penyusun rencana saja, bukan berdasarkan kepentingan masyarakat karena masyarakat tidak terlibat di dalamnya sehingga nantinya rencana pembangunan yang disusun tidak tepat pada sasarnya dan merugikan masyarakat.

B. SARAN

Bertitik tolak pada hasil penelitian, maka perlu disarankan beberapa hal yang berkenaan dengan penelitian ini yakni :

1. Hendaknya peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi karena masih adanya masyarakat yang belum terlibat dalam proses perencanaan partisipatif tersebut membuat beberapa program menjadi kurang tepat sasaran. Dengan begitu semakin banyak partisipasi warga dalam proses perencanaan partisipatif semakin baik pula rencana yang disusun dan tepat pada masyarakat yang membutuhkan.
2. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan partisipatif tersebut hendaknya aparat pemerintah kelurahan, BKM dan tim fasilitator PNPM mandiri semakin lebih proaktif dalam mengajak warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sehingga nantinya rencana yang disusun tepat

pada sasaran yakni warga miskin yang ada di kelurahan Batu Kota Manado.

3. Kiranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri ini terus berlanjut dalam mengatasi kemiskinan yang ada di kelurahan Batu Kota karena PNPM Mandiri merupakan program yang sangat baik karena selain ditujukan kepada masyarakat miskin melalui program ini masyarakat diberdayakan untuk menjadi masyarakat yang mandiri yang tidak hanya tergantung pada bantuan pemerintah yang siap jadi tapi mampu mengolahnya dan mampu meningkatkan kesejahteraannya sendiri, selain itu program-program yang belum terealisasi agar segera direalisasikan dan tidak dipersulit dengan birokrasi yang bertele-tele.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. Perencanaan daerah partisipatif. Solo: Pondok Edukasi
- Kuncoro, Mudradjad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah, PT Gramedia Pustaka utama Jakarta.